

## **BAB IV**

# **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

Selanjutnya identifikasi permasalahan pembangunan menurut fungsi dan urusan pemerintahan daerah dirinci sebagai dasar perumusan kebijakan umum dan program-program pembangunan untuk lima tahun ke depan.

### **4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah ini dibagi dalam dua kelompok yakni “permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan “permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah”.

#### **1. Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.**

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dalam perumusan masalah ini digunakan tiga konsep tentang masalah pembangunan daerah yakni masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro bagi daerah, dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran.

Masalah adalah beberapa penyebab dari masalah pokok, dipecahkan melalui rumusan strategi. Akar masalah adalah penyebab dari masalah yang lebih rinci, dipecahkan melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Berdasarkan pemahaman tersebut maka permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan sebagai berikut.



**Tabel 4.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketertinggalan Kualitas Manusia	Rendahnya daya saing dan keunggulan sumberdaya manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya di lembaga PAUD</li> <li>- Masih kurangnya lembaga PAUD</li> <li>- Belum optimalnya angka capaian APM jenjang pendidikan dasar/ sederajat dan APM SMP/ sederajat</li> <li>- Masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan menengah</li> <li>- Fasilitas pendidikan dalam hal ini Jumlah sekolah (Rasio Murid Sekolah) dan jumlah tenaga pengajar (Rasio Murid Guru) masih belum proporsional. Salah satu penyebabnya adalah ada beberapa sekolah yang jumlah muridnya dibawah standard sehingga gedung sekolah banyak yang kekurangan murid.</li> <li>- Masih rendahnya mutu tenaga pendidikan di</li> </ul>

			<p>Kabupaten Takalar (jumlah tenaga pendidikan bersertifikasi masih rendah)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya derajat kesehatan masyarakat</li> <li>- Masih rendahnya kualitas SDM secara komprehensif meliputi aspek kepribadian, sikap mental, penguasaan IPTEK, profesionalisme serta kompetensi</li> </ul>
2.	Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat	Rendahnya Produktivitas sektor-sektor perekonomian dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pengelolaan sektor- unggulan</li> <li>- Masih terdapat masyarakat yang menganggur</li> <li>- Masih rendahnya keterampilan/ pengetahuan, inovasi dan kreatifitas untuk pengembangan berbagai sektor.</li> <li>- Masih tingginya beban hidup masyarakat miskin</li> </ul>
		Kurang berkembangnya investasi untuk pemanfaatan potensi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iklim investasi yang tidak kondusif</li> <li>- Belum optimalnya pemanfaatan lahan-lahan tidur</li> <li>- Masih terbatasnya pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan dan irigasi, serta jaringan IT</li> <li>- Masih rendahnya konektivitas dan promosi pada sumber daya yang ada.</li> </ul>
		Kurang berkembangnya wawasan lingkungan dan penguatan desa dalam Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum efektifnya tata kelola pembangunan desa</li> <li>- Terjadinya degradasi lingkungan di wilayah pesisir serta kawasan hutan</li> <li>- Masih rendahnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan</li> </ul>
3.	Kurang berkembangnya tatanan masyarakat dan tatakelola pemerintahan yang baik	Kurang terpeliharanya kehidupan agamis, tertib dan demokratis dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pengamalan nilai - nilai religius dalam kehidupan beragama</li> <li>- Belum optimalnya kehidupan masyarakat yang demokratis</li> </ul>
		Belum optimalnya penerapan tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang bermutu dan manusiawi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi</li> <li>- Masih rendahnya kapasitas, kompetensi dan kinerja aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa</li> <li>- Masih rendahnya rasa kebangsaan, dedikasi, integritas serta pola pikir masyarakat.</li> </ul>

## 2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterahkan masyarakat.

Berikut ini tabel permasalahannya urusan pelayanan yang mengarahkan pada indikasi pencapaian kinerjanya dan perangkat daerah yang harus mengemban penyelenggaraan solusinya.

**Tabel 4.2**  
**Permasalahan Urusan**

No	Urusan	Permasalahan	SKPD Penanggung Jawab	
1.	Pendidikan		DINAS PENDIDIKAN	
		Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Takalar		
		Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah		
		Masih kurangnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		
		Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD		
		Belum maksimalnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI		
		Belum maksimalnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI		
		Masih Tingginya Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI		
		Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP / MTs		
		Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP / MTs		
		Masih Tingginya Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs		
		Masih rendahnya persentase kondisi bangunan baik tingkat SD / MI		
		Masih rendahnya persentase kondisi bangunan baik tingkat SMP / MTs		
		Distribusi guru belum merata		
		Masih rendahnya kompetensi guru		
2.	Kesehatan		DINAS KESEHATAN	

	Masih rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH)		
	Minimnya Pembangunan fasilitas Pelayanan Kesehatan		
	Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)		
	Masih tingginya Angka Kematian Balita (AKaBa)		
	Belum optimalnya Kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Belum optimalnya kinerja SDM kesehatan dan Kefarmasian		
	Masih kurangnya ketersediaan tenaga medis, Dokter Umum dan Dokter Spesialis		
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PU, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	Belum Terwujudnya Sistem Jaringan Jalan Yang Andal serta Terpadu dan Berbasis Penataan Ruang Yang Berkelanjutan		
	Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten belum Mantap		
	Kondisi Jaringan Jembatan Kabupaten belum Mantap		
	Belum direvisinya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012-2030		
	Belum optimalnya pembinaan Jasa Konstruksi		
	Belum efektifnya penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi		
	Belum optimalnya penyediaan air baku		
	Belum optimalnya Luas layanan jaringan irigasi teknis (Ha)		
4.	Perumahan dan Pemukiman	DINAS PU, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	Kurang optimalnya penanganan persampahan		
	Masih kurang optimalnya penangan air limbah domestik (Rumah Tangga)		
	Masih kurang optimalnya penangan air bersih di kawasan pemukiman		
	Kurangnya sediaan Air bersih Terhadap		

	Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat di kawasan pesisir dan wilayah rawan air bersih lainnya		
	Tidak tersedianya database tentang kawasan kumuh		
	Rendahnya Rasio Rumah Layak Huni		
5.	Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	Belum efektifnya Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	Belum efektifnya penanganan daerah rawan bencana		
	Masih kurangnya upaya penegakan Peraturan Perundang-undangan		
	Kurangnya Kompetensi anggota dalam pelayanan		
	Belum optimalnya Pelayanan Bencana Kebakaran		
6.	Sosial	DINAS SOSIAL	
	Masih tingginya jumlah PMKS		
	Belum efektifnya Penanganan korban bencana		
	Masih kurangnya bimbingan Sosial dan pelatihan keterampilan		
	Kurangnya Ketersediaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS		
	Belum optimalnya Bantuan Korban Bencana		
	Minimnya Masyarakat yang mendapat Jaminan Sosial		
	Belum optimalnya pemberdayaan sosial terhadap masyarakat		
	Kurangnya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang dibina		
	Masih kurangnya Pemberdayaan Keluarga yang dibina		
	Belum optimalnya masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial		
7.	Tenaga Kerja	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	Masih minimnya partisipasi Angkatan Kerja		
	Masih kurangnya Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja		
	Belum meningkatnya		

		Produktivitas Tenaga Kerja		
		Masih kurangnya Pelatihan dan kompetensi kerja		
		Masih rendahnya kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		
		Kurangnya Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja		
		Masih rendahnya Kesempatan Kerja		
8.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
	Masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
		Belum terpenuhinya Data Terpilah Gender dan Anak		
		Belum efektifnya Perencanaan Responsif Gender		
		Masih rendahnya Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah		
		Banyaknya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)		
		Masih banyaknya Kasus Kekerasan Terhadap Anak		
		Kurangnya penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		
		Belum meningkatnya perlindungan hak perempuan		
		Kurangnya Perlindungan Khusus Anak		
		Kurangnya Perlindungan Khusus Anak		
9.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Belum meningkatnya Penggunaan Alat Kontrasepsi / CPR		
		Kurangnya Peserta KB baru		
		Masih tingginya Keluarga Pra Sejahtera		
10.	Administrasi Kependudukan dan		DINAS ADMINISTRASI	

	Pencatatan Sipil	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	Belum optimalnya kepemilikan e-KTP		
	Masih kurangnya bayi berakte kelahiran		
	Masih kurangnya Pasangan berakte nikah		
	Masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran		
	Belum baiknya profil kependudukan		
11.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
	Masih Minimnya Jumlah Desa Mandiri		
	Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pengembangan kerjasama Lembaga Desa dan Pemerintahan Desa		
	Belum optimalnya upaya realisasi lembaga kemasyarakatan desa kategori baik		
	Belum optimalnya upaya realisasi masyarakat desa yang berhasil setelah diberdayakan		
	Belum optimalnya pengisian dan pemanfaatan profil Desa		
	Belum optimalnya kelembagaan BUMDES di Desa		
12.	Pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	Belum terpenuhinya kebutuhan dan ketersediaan pangan		
	Masih kurangnya ketersediaan bahan pangan		
	Banyaknya masalah distribusi pangan yang belum terselesaikan		
	Masih kurangnya konsumsi energi dan konsumsi protein		
13.	Kelautan dan Perikanan	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	
	Rendahnya pertumbuhan sektor perikanan		
	Kurangnya Pemanfaatan Sumber daya Kelautan yang sesuai dengan Zonasi		
	Masih belum optimalnya Produksi Perikanan Tangkap		
	Lambatnya minimnya jumlah kelompok usaha mandiri		
	Kurangnya Penanganan Pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan		



14.	Lingkungan Hidup		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
	Belum meningkatnya Indeks Kualitas Air			
	Masih rendahnya Indeks Kualitas Udara			
		Kurangnya Ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundangan dan ketentuan izin		
		Rendahnya Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup		
		Masih kurangnya Ketaatan Industri Terhadap Baku Mutu Air Limbah dan Emisi Udara		
	Minimnya Kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan			
15.	Pertanahan		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
	Masih rendahnya permohonan izin lokasi			
	Masih kurangnya luas tanah yang bersertifikat			
16.	Perhubungan		DINAS PERHUBUNGAN	
	Masih kurangnya keselamatan dan kenyamanan di jalan raya			
		Belum optimalnya pembinaan, pemantauan dan pengendalian angkutan darat		
		Masih tingginya angka kecelakaan pada LLAJR		
		Kurangnya pengembangan sistem transportasi wilayah		
		Belum termanfaatkannya terminal angkutan kota		
		Masih rendahnya rasio izin trayek		
17.	Komunikasi dan Informatika			
	Belum optimalnya aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika			
		Masih kurangnya Ketersediaan Perangkat Teknologi Informasi		
		Belum tersedianya Rencana Induk Komunikasi		
		Masih kurangnya Pelayanan dalam Penyebarluasan Informasi Pembangunan		
18.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN	

		TRANSMIGRASI	
	Masih kurangnya realisasi Koperasi aktif dan sehat		
	Masih minimnya Realisasi usaha kecil yang menjadi usaha menengah		
	Masih kurangnya realisasi tingkat kesehatan koperasi KSP/USP dan KSPPS / UKSPPS		
	Masih sedikitnya koperasi aktif binaan yang cukup berkualitas		
	Masih kurangnya realisasi kinerja koperasi binaan (volume usaha, kapasitas produksi, aset dan keuntungan)		
	Masih rendahnya Laju Pertumbuhan Omset UKM		
19.	Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Belum adanya realisasi PMA		
	Masih kurangnya realisasi PMDN		
	Masih kurangnya minat calon investor		
	Masih kurangnya MOU kerjasama investasi		
	Belum tersedianya sistem informasi penanaman modal daerah		
	Kurang efektifnya pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		
	Belum tepatnya Penerbitan perizinan dan non perizinan		
	Masih kurangnya pengaduan yang terlayani		
20.	Kepemudaan dan Olahraga	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Masih kurangnya Cabang Olahraga Berprestasi tingkat regional		
	Masih lemahnya pembinaan organisasi Kepemudaan		
	Masih lemahnya pembinaan kepramukaan		
	Masih kurangnya Penyelenggaraan Olahraga Massal		
	Kurangnya Keikutsertaan Kabupaten Takalar pada event wilayah dan nasional		

		Belum efektifnya pembinaan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda		
21.	Perpustakaan dan Kearsipan		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	Masih kurangnya kepuasan pengunjung perpustakaan daerah			
	Belum optimalnya SKPD yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan			
		Masih rendahnya jumlah pengunjung perpustakaan		
		Masih sedikitnya Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar Nasional		
		Masih kurangnya jumlah koleksi buku pada perpustakaan daerah		
		Belum optimalnya penyelenggaraan layanan kearsipan		
22.	Persandian		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Belum meningkatnya dukungan layanan persandian			
		Belum baiknya kinerja persandian statistik dan layanan Pengadaan		
23.	Statistik		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Belum meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan statistik			
		Belum tersedianya Data pembangunan Daerah		
24.	Kebudayaan		DINAS PARIWISATA	
	Masih rendahnya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah			
		Masih belum optimalnya Pelestarian Event Masyarakat Adat		
		Kurangnya pembinaan organisasi kesenian (sanggar/ kelompok seni dan budaya)		
25.	Pariwisata		DINAS PARIWISATA	
	Belum optimalnya peningkatan Kunjungan Wisatawan			
		Belum optimalnya penambahan dan perkembangan destinasi daya tarik wisata		
		Kurangnya promosi wisata dalam negeri dan luar negeri		

		Belum berkembangnya Industri ekonomi kreatif		
		Belum berkembangnya Industri pariwisata sebagai destinasi utama		
		Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM ekonomi kreatif		
		Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM pariwisata untuk dapat bersaing		
26.	Pertanian		DINAS PERTANIAN	
		Belum optimalnya produktivitas pertanian (Tanaman Pangan , Horti, kebun, Ternak)		
		Belum terpenuhinya sarana prasarana produksi pertanian		
		Masih kurangnya luas tanam dan produktifitas		
		Belum meningkatnya Produksi Komoditas Buah dan Florikultura		
		Kurangnya Produksi Komoditas Sayuran dan Tanaman Obat		
		Masih kurangnya penerapan Inovasi Teknologi Hortikultura		
		Masih kurangnya Produksi dan Pengembangan kawasan komoditas perkebunan		
		Belum meningkatnya Produksi Ternak		
		Masih kurangnya Produksi Hijauan Pakan Ternak (HPT)		
		Kurangnya Penerapan Teknologi Peternakan		
		Kurangnya Pengawasan Obat Hewan dan Produk Asal Hewan		
		Kurangnya Pengendalian Penyakit Hewan Menular (PHM)		
		Belum adanya Penjaminan Keamanan Pangan Asal Hewan		
27.	Kehutanan		DINAS PERTANIAN	
		Masih kurangnya luas area rehabilitasi hutan dan lahan		
		Belum optimalnya Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung		
		Belum meningkatnya fungsi hutan dan kawasan lindung		
28.	Perdagangan dan perindustrian		DINAS PERDAGANGAN	

	Masih lambatnya pertumbuhan Usaha Perdagangan		
	Belum optimalnya pembangunan industri Kabupaten		
	Kurangnya penguatan Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah		
	Masih minimnya Kerjasama SDM berkompetensi Industri		
	Belum efektifnya Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan		
	Masih rendahnya nilai transaksi penjualan ke luar daerah / luar negeri		
	Masih kurangnya Mutu/Daya Saing, Standarisasi dan Sertifikasi Produk		
	Belum optimalnya Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa		
29.	Transmigrasi	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	Belum optimalnya Persiapan, Pemetaan dan Pengembangan Permukiman Transmigrasi		
30.	Perencanaan Pembangunan	BADAN PERENCAAN, PENELITIAN, DAN PENEKEMBANGAN	
	Masih kurangnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		
	Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Perkonomian		
	Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan		
	Belum efektifnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah		
	Masih kurangnya penelitian yang dimanfaatkan		
	Belum lengkapnya ketersediaan Data pembangunan Daerah		
31.	Keuangan Daerah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	Belum baiknya pengelolaan keuangan pemerintah terhadap pencapaian kinerja		

	daerah		
	Kurangnya pengelolaan keuangan dan aset daerah		
	Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah		
	Masih kurangnya kualitas pelayanan perbendaharaan dan anggaran		
	Masih kurangnya pelaksanaan manajemen aset daerah		
	Belum efektifnya perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah terhadap potensi daerah yang tersedia		
	Masih kurangnya Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah		
	Masih kurangnya ketersediaan regulasi pengelolaan pendapatan daerah dan ketatalaksanaan badan		
	Belum optimalnya pendapatan pajak daerah		
	Belum optimalnya Potensi Wajib Pajak Daerah		
	Masih rendahnya hasil Retribusi Daerah		
	Belum optimalnya Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah		
	Masih kurangnya ketersediaan regulasi pengelolaan bagi hasil pajak/non pajak		
32.	Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	Masih rendahnya kinerja pegawai dengan kategori baik		
	Masih rendahnya kepuasan penerima layanan diklat		
	Belum optimalnya pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan		
	Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya		
	Kurangnya akurasi data kepegawaian		
	Masih kurangnya pegawai		

		yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai		
		Kurangnya Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur		
		Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme penyelenggara diklat		
		Masih belum terselenggaranya Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional		
		Masih kurangnya penyelenggaraan Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan		
33.	Pengawasan		INSPEKTORAT KABUPATEN	
		Belum optimalnya Temuan BPKP yang ditindaklanjuti		
		Belum efektifnya pembinaan dan pengawasan		
		Belum optimalnya Temuan BPK yang ditindaklanjuti		
		Masih rendahnya tindak Lanjut LHP		
		Belum efektifnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		
34.	DPRD		SEKRETARIAT DPRD	
		Belum optimalnya pelayanan penyelenggaraan administrasi, pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
		Belum baiknya Kinerja Fungsi DPRD		
		Belum tepatnya laporan Akuntabilitas Kegiatan		
		Belum efektifnya pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sekretariat DPRD		
		Masih kurangnya Dukungan alat kelengkapan DPRD terhadap pelaksanaan fungsi Pengawasan		

## A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

### 1. Pendidikan

Angka rata-rata lama sekolah pada Tahun 2017 sebesar 6,77 tahun lebih rendah dibawah rata-rata provinsi sebesar 7,95 tahun. Angka

harapan lama sekolah pada Tahun 2017 sebesar 12,21 tahun atau tepatnya kuliah semester II lebih rendah dari rata rata propinsi sebesar 13,28 tahun. Ini disebabkan oleh masih belum optimalnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD 98,85%, SMP 70,56%, SMA 55,50%. Selain itu Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 93,28%, SMP 79,45% dan SMA 82,53 juga masih belum optimal.

Salah satu akar masalah dari belum optimalnya kinerja ini adalah masih rendahnya rasio sekolah dengan jumlah murid SD 132,09, SMP 186%, SMA 243,50%, SMK 441,05%, rasio murid ruang belajar dengan jumlah murid yang belum sebanding dan rasio guru dengan murid SD 11,77%, SMP 13%, SMA 13,77, SMK 10,69%. Selain itu hambatan sosial yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, mahal nya biaya pendidikan, rendahnya guru yang memenuhi kualifikasi SI, D-IV dan anak usia sekolah yang terlibat dalam dunia kerja.

## **2. Kesehatan**

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator pendukung indeks pembangunan manusia, AHH Kabupaten Takalar selama periode Tahun 2013 - 2015 mengalami penurunan sebesar 4,37 tahun, dari sebesar 70,27 tahun pada Tahun 2013, menjadi 65,90 tahun pada Tahun 2015 kemudian kembali mengalami kenaikan pada Tahun 2016 menjadi 66,20 tahun dan 66,38 tahun pada Tahun 2017. Capaian AHH Kabupaten Takalar selama 5 (lima) tahun berturut-turut masih di bawah capaian AHH Provinsi Sulawesi Selatan. Dapat dikatakan bahwa meskipun capaian AHH Kabupaten Takalar selalu lebih rendah dari capaian Provinsi, namun tren capaian AHH Kabupaten Takalar menunjukkan *gap* yang semakin menyempit dengan provinsi. Lebih rendahnya capaian AHH Kabupaten Takalar dibandingkan dengan capaian Provinsi antara lain disebabkan perkembangan kasus balita gizi buruk di Kabupaten Takalar sepanjang Tahun 2013 - 2016 menurut standar pengukuran berat badan/tinggi badan (BB/TB) menunjukkan tren yang cukup fluktuatif, dari yang sebanyak 1 kasus pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 menjadi 11 kasus pada Tahun 2015, kemudian turun kembali menjadi 6 kasus pada Tahun 2016 dan 3 kasus pada Tahun 2017. Setiap tahun kasus gizi buruk dapat tertangani secara keseluruhan atau 100 persen. Dengan capaian tersebut maka target kasus balita gizi buruk yang ditetapkan dalam RPJMD tertangani 100 persen pada Tahun 2017 sudah



tercapai. Walaupun tren kasus gisi buruk mengalami penurunan tetapi capaian masih belum optimal.

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 0,57%, artinya panjang jalan dalam kondisi baik adalah sepanjang 462,71 km dari total panjang jalan seluruhnya yakni 806,00 km. Kondisi ini menyiratkan bahwa kurang lebih setengah total panjang jalan yang ada di Kabupaten Takalar masih dalam kondisi baik sedangkan sisanya dalam kondisi rusak. Proporsi jalan baik masih kurang disebabkan antara lain akibat tingginya beban kendaraan yang lalulalang (berulang-ulang), kondisi muka air tanah yang tinggi, dan waktu pelaksanaan serta perencanaan yang belum sesuai standar.

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk adalah sebesar 0,002. Rasio panjang jalan menunjukkan kondisi dalam 1 km jalan berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk.

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat yaitu sebesar 30,10%. Berdasarkan angka tersebut, berarti masih ada sekitar 60,90% yang perlu diperbaiki. Kondisi tersebut antara lain diakibatkan oleh kapasitas saluran drainase yang menjadi berkurang akibat sedimentasi, sehingga meningkatnya debit air dalam saluran, air meluap dan terjadilah genangan, selain itu diakibatkan oleh peningkatan jumlah penduduk, karena berpengaruh terhadap peningkatan limbah hasil buangan manusia dan terjadinya amblesan tanah, akibat pengambilan air tanah yang cukup besar. Sedangkan persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) hanya sebesar 1,09% atau hanya 8,200 km jalan yang memiliki trotoar dan drainase dari 754,49 panjang jalan total di Kabupaten Takalar.

Pengelolaan air irigasi dari hulu (*upstream*) sampai dengan hilir (*downstream*) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa bendungan, bendung, saluran primer, saluran sekunder, boks bagi, bangunan ukur, dan saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani. Berdasarkan data yang diperoleh, angka persentase irigasi dalam kondisi baik yaitu sebesar 72,12%. Angka tersebut merupakan luas kondisi Irigasi yang baik seluas 2.511,2 Ha berbanding dengan 3.482 Ha luas Daerah Irigasi yang ada. Sehingga masih ada seluas 970 Ha DI yang dalam kondisi rusak atau sekitar 27,88% dari luas total

Dearah Irigasi (DI). Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat 5.932,0 Ha (35,70%) dari 16.618,50 Ha sawah yang memanfaatkan aliran irigasi yang telah tersedia. Sehingga masih ada sekitar 10.686,50 Ha (64,30%) areal sawah yang belum terjangkau oleh aliran irigasi. Permasalahan ini disebabkan kerusakan jaringan irigasi primer, sekunder maupun tersier; tidak berfungsinya alat pengamat debit di outlet saluran primer dan sekunder; belum terpasang alat tinggi muka air di saluran tersier; sedimentasi di saluran primer, sekunder, dan tersier.

Rasio ruang terbuka hijau (RTH) untuk kurun waktu Tahun 2013-2017 mengalami kenaikan walaupun sangat kecil yakni 2,44%, sedangkan luasan RTH publik sebesar 20% untuk kurun waktu yang sama di Kabupaten Takalar belum tersedia datanya. Untuk rasio bangunan ber-IMB juga masih sangat kecil yakni 0,11% dari jumlah bangunan keseluruhan yang tercatat pada Tahun 2017 yakni 55.009 bangunan. Capaian kinerja untuk pekerjaan umum dan penataan ruang relative masih sangat rendah dan harus diperbaiki untuk lima tahun kedepan.

#### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Persentase areal kawasan kumuh di Kabupaten Takalar belum tersedia datanya. Ini menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah dan dinas yang menangani secara teknis. Penanganan persampahan juga belum optimal, fasilitas pengurangan sampah perkotaan berupa TPS3R masih 2 unit sedangkan volume sampah perkotaan yang harus ditangani adalah sebesar 673,92 m<sup>3</sup>.

Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Takalar mengalami peningkatan pada Tahun 2013-2017. Jika pada Tahun 2013 hanya 74,41% saja, pada Tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 88,01%. Sedangkan rasio penduduk berakses air minum datanya belum tersedia. Demikian halnya dengan database tentang kawasan kumuh yang juga belum tersedia datanya, padahal dibutuhkan adanya database tentang kawasan kumuh untuk intervensi dan penanganan yang lebih lanjut.

Rasio rumah layak huni di Kabupaten Takalar Tahun 2013-2017 adalah 0,21, tidak mengalami perubahan selama lima tahun terakhir. Masih sangat kecil dibanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Takalar yang sebesar 292.983 jiwa. Rasio permukiman layak huni sudah diatas 0,50 yakni dikisaran 0,74. Demikian juga dengan cakupan ketersediaan rumah

layak huni sudah mencapai 0,82. Artinya sisa 0,18 yang harus ditangani. Meskipun secara umum tren pelayanan sudah cukup baik, namun Pemerintah Kabupaten harus mengoptimalkan kinerja melalui dinas teknis untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Database yang belum tersedia khususnya pada bidang permukiman harus menjadi perhatian karena hampir semua indikator kinerja datanya tidak dapat disajikan.

## **5. Sosial**

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Takalar Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 sebesar 23,84%, menurun di Tahun 2014 sebesar 23,52%, meningkat di Tahun 2015 sebesar 23,64%, dan kembali menurun pada Tahun 2016 sebesar 23,47%. Pada Tahun 2017 naik menjadi 26,38%. Dapat dilihat bahwa masih sangat rendahnya PMKS yang mendapatkan bantuan sosial di Kabupaten Takalar. Untuk Tahun 2017, hanya 4.869 PMKS yang diberikan bantuan dari 18.454 jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Sedangkan persentase PMKS yang tertangani untuk kurun waktu yang sama juga mengalami fluktuasi. Tahun 2013 ada 19,90% PMKS yang tertangani, naik menjadi 33,5% pada Tahun 2017 dari 20.258 jumlah PMKS yang ada. Secara keseluruhan, PMKS yang memperoleh bantuan maupun yang tertangani masih sangat rendah. Panti sosial yang menerima program pemberdayaan social melalui KUBE masih pada kisaran 6,96%, korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat hamper menyentuh angka 50% yakni 46,8%. Sedangkan persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sudah mencapai angka 52,26% dari 840 orang yang seharusnya tertangani, namun masih ada 401 yang harus ditangani oleh pemerintah kabupaten melalui dinas teknis yang menangani.

## **6. Ketentraman, Ketertiban & Linmas**

Belum optimalnya peran serta Ormas atau LSM dalam meningkatkan wawasan kebangsaan di masyarakat meskipun secara umum cakupan petugas Linmas di Kabupaten Takalar berada pada kisaran 200, namun pada tataran tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) sudah berada pada kisaran 97,22 pada Tahun

2017, merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun kebelakang. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP pada Tahun 2013 berada pada angka 12, mengalami kenaikan signifikan pada Tahun 2014 sebesar 128 kemudian kemudian kembali mengalami penurunan sampai Tahun 2017 di angka 72. Hal tersebut mengindikasikan semakin aktifnya Petugas Satpol PP dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran sudah mencapai 86, mengindikasikan petugas pemadam kebakaran mampu menjangkau wilayah manajemen kebakaran seluas 487,2 km<sup>2</sup> dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten seluas 566,51 km<sup>2</sup>. Masih perlu ditingkatkan karena tersisa 79,31 km<sup>2</sup> luas wilayah yang belum terjangkau oleh petugas pemadam kebakaran.

Tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran juga sudah mencapai 84,44 pada Tahun 2017. Ini disebabkan oleh kesigapan petugas kebakaran merespon aduan masyarakat dalam waktu maksimal 15 menit. Hal ini juga masih perlu ditingkatkan karena untuk Tahun 2017 masih ada 7 kasus kebakaran yang terlambat ditangani. Kuantitas dan kualitas mobil pemadam kebakaran serta kapasitas petugas pemadam harus lebih dioptimalkan. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam tingkat waktu tanggap antara lain adalah :

1. Jika lalu lintas macet maka armada tidak bisa datang dengan cepat ke lokasi.
2. Terkadang pemadam datang dilokasi masyarakat langsung menarik selang yang kadang belum terhubung.
3. Adanya jalur ke lokasi yang tidak memungkinkan untuk dilewati oleh armada pemadam.

Persentase penegakan PERDA Kabupaten pada Tahun 2013-2017 mengalami peningkatan yang positif, bahkan untuk Tahun 2017 mencapai angka 97,22%, disisi lain jumlah pelanggaran perda masih cukup tinggi yakni 108. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi PERDA.

## **B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**

### **1. Tenaga Kerja**

- a. Tingkat partisipasi angkatan kerja

Angka partisipasi Angkatan kerja Tahun 2017 sebesar 64,37% dari 214.005 jumlah penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dan pengangguran dikategorikan sebagai angkatan kerja. Angkatan kerja Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 18.019 dari Tahun 2016 yang hanya sebesar 119.726 jiwa. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan TPAK. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

b. Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2017 sebesar 4,93% dari jumlah angkatan kerja sebesar 137.745, mengindikasikan bahwa ada 6.785 angkatan kerja yang menganggur dari total jumlah angkatan kerja tersebut. Pengangguran terbuka tersebut harus diminimalisir melalui upaya-upaya nyata pemerintah dalam membuka/ menyediakan/ memfasilitasi lapangan pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja secara maksimal sehingga tingkat pengangguran terbuka bisa ditekan seminimal mungkin.

c. Rasio penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja pada Tahun 2017 cukup tinggi yakni berada pada angka 95,07% dari jumlah angkatan kerja sebesar 137.745, yang artinya 130.960 jiwa diantaranya adalah penduduk yang bekerja. Semakin tinggi rasio penduduk yang bekerja, maka semakin rendah tingkat pengangguran di suatu wilayah.

d. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas pada Tahun 2017 masih sangat rendah yakni sebesar 8,56%. Mengalami sedikit kenaikan dari Tahun 2016 yang hanya sebesar 8,32%. Jumlah penduduk usia kerja terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun kesempatan kerja tidak mengalami peningkatan yang cukup untuk mengakomodir angkatan kerja tersebut. Dari 214.005 penduduk

usia kerja, hanya 2.500 kesempatan kerja yang ada sehingga gap antara kesempatan kerja dan penduduk usia kerja masih sangat lebar.

- e. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja pada Tahun 2017 hanya sebesar 11,15 dari 23.876 jumlah tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga. Mengalami penurunan dari Tahun 2016 yang mencapai 11,47.

## **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Untuk indikator kinerja bidang pemberdayaan perempuan, masih banyak yang datanya belum dapat disajikan termasuk persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan partisipasi perempuan di lembaga swasta. Sedangkan untuk proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD sudah hampir mencapai angka 30% sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang, dimana pada Tahun 2017 sudah menyentuh angka 26,66% dari total 30 anggota DPRD di Kabupaten Takalar. Untuk periode kedepan, proporsinya harus ditingkatkan bukan hanya sekedar untuk menggambarkan keterwakilan perempuan di DPRD namun harus menggambarkan kapasitas dan kelayakan perempuan untuk duduk di DPRD.

Rasio KDRT untuk Tahun 2013-2017 masih tergolong rendah, bahkan untuk Tahun 2017 hanya 3 kasus dengan rasio 0,003% dari 86.594 rumah tangga yang ada. Meskipun demikian, konsistensi dan peran P2TP2R harus lebih ditingkatkan untuk meminimalisir jumlah KDRT di masyarakat.

Untuk persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur dan partisipasi angkatan kerja perempuan, basis datanya harus diperbaiki.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi, pada Tahun 2016 sebanyak 83 kasus (delapan puluh tiga kasus), terdiri dari 38 kasus kekerasan terhadap perempuan, 50 kasus kekerasan terhadap anak. Akumulasi jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak Tahun 2017 sebanyak 15 kasus, terdiri dari kasus terhadap perempuan 11 kasus dan kekerasan terhadap anak 3 kasus. Hal ini disebabkan oleh penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan belum melibatkan semua stakeholder. Keterlibatan lembaga masyarakat dunia usaha, media massa

dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan kekerasan anak. Sehingga berdampak pada fasilitas umum yang belum berbasis ramah anak, contohnya sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak dan desa ramah anak. Permasalahan secara umum terkait pemberdayaan perempuan dan anak adalah rendahnya capaian kedudukan perempuan sebagai pemimpin di lembaga pemerintahan. Keterlibatan perempuan dalam dunia pemerintahan belum optimal, data Tahun 2017 pejabat perempuan yang bereselon 2 hanya 1 orang pejabat perempuan. Belum tersedianya secara lengkap data terpilah gender pada seluruh OPD sebagai dasar untuk perencanaan program kegiatan maupun pengambilan kebijakan.

### **3. Ketahanan Pangan**

Ketersediaan dan konsumsi bahan pangan Tahun 2016 mencapai 88.897 ton (0,03%) dari 289.978 penduduk. Sedangkan Tahun 2015 sebesar 81.763 ton (0,028%). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat ketersediaan pangan utama Tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 7.134 ton. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya produktivitas tanaman pangan utama (Padi), meskipun hal ini juga dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk.

Ketersediaan energi dan protein perkapita perhari yang bersumber dari pangan utama Tahun 2016 yaitu 43,53, sedangkan pada Tahun 2015 sebesar 40,90. Peningkatan ketersediaan energi dan Protein (KKal) yang bersumber dari pangan utama sejalan dengan peningkatan ketersediaan pangan yang didukung dengan peningkatan produktivitas tanaman pangan utama (Padi). Jika dilihat dari ketersediaan energi dan protein tersebut maka dapat diketahui bahwa tingkat ketersediaan energi dan protein perkapita perhari dapat terpenuhi dari pangan utama.

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan untuk kurun waktu Tahun 2013-2017 datanya belum dapat disajikan sehingga belum dapat diketahui sejauhmana peran stakeholder yang ada dalam upaya perlindungan masyarakat khususnya dalam konsumsi pangan.

### **4. Pertanian**

Badan Pertahanan Nasional (BPN) menyatakan bahwa ada 9 (sembilan) tugas pertanian yang menjadi urusan pemerintah daerah,

diantaranya tentang izin lokasi, sengketa tanah, pengadaan tanah, serta penetapan subyek obyek retribusi tanah.

Tingkat capaian pelayanan bidang pertanahan diukur berdasarkan luas lahan yang bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara dan penyelesaian izin lokasi. Pada Tahun 2016 capaian luas lahan yang bersertifikat adalah sebesar 0,91% sedangkan capaian untuk Tahun 2017 hanya 0,19%. Jadi terdapat 131.109,2 M<sup>2</sup> tanah yang sudah disertifikatkan dari 56.446.005.422 M<sup>2</sup> yang seharusnya disertifikatkan. Ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah untuk legalitas serta mahalnya biaya pengurusan sertifikat. Pada Tahun 2017 capaian penyelesaian kasus tanah negara sebesar 57,89% sedangkan data untuk tahun sebelumnya belum tercatat. Hal ini disebabkan banyaknya sertifikat tanah ganda serta tidak adanya bukti sertifikat yang bisa diperlihatkan dari pihak yang bersengketa, misalnya sengketa tanah sekolah yang banyak terjadi sekarang. Selanjutnya capaian penyelesaian ijin lokasi pada Tahun 2013-2017 belum tercatat datanya sama sekali. Ini mencerminkan bahwa pencatatan administrasi oleh instansi yang menangani harus diperbaiki.

## **5. Lingkungan Hidup**

Hal menjadi permasalahan utama suatu daerah yang berkembang adalah penanganan persampahan, hal tersebut juga menjadi isu penting dalam aspek lingkungan hidup di Kabupaten Takalar. Secara umum, peningkatan laju sampah di wilayah kabupaten Takalar masih belum diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana penanganan sampah dan limbah. Masih rendahnya penanganan sampah, ditunjukkan dengan kondisi penampungan sampah (TPS/satuan penduduk) pada Tahun 2017 baru mencapai 299 unit dari jumlah penduduk pada tahun tersebut adalah 282.978 ( $289.978:299 = 970$ ), artinya bahwa setiap 1 (Satu) Tempat Pembuangan Sampah/TPS melayani sebanyak 970 orang. Jadi masih sangat banyak sampah yang belum tertampung ini dikarenakan terbatasnya tempat penampungan sampah yang tersedia pada skala rumah tangga.

Melihat persentase jumlah volume sampah dan produksi sampah di Tahun 2017 sebesar 9,07% sedikit mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 9,30%, hal ini tidak terlepas dari kinerja aparat



kebersihan dengan adanya penambahan armada dan personel penanganan sampah serta meningkatnya pendanaan operasional yang dikoordinir oleh Dinas Kebersihan, Lingkungan Hidup dan Pertanian. Akan tetapi terlihat masih belum optimalnya cakupan layanan persampahan yang masih belum mampu mencakup seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Takalar. Untuk saat ini, penanganan persampahan hanya mencakup wilayah perkotaan Kabupaten Takalar yang meliputi wilayah disekitar Kecamatan Pattallassang dan sebagian wilayah Polongbangkeng Selatan.

Pengelolaan Akhir sampah juga masih kurang optimal karena masih menggunakan metode *open dumping*. Upaya sementara dilaksanakan secara infrastruktur dan kelembagaan untuk pengembangan TPA di Kabupaten Takalar yang dipusatkan di daerah Balang, Kecamatan Polsel. Penanganan persampahan dikembangkan menuju proses *sanitary landfill* dan kelembagaannya akan ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) TPA Balang di bawah Koordinasi Dinas Kebersihan, Lingkungan Hidup dan Pertanian.

Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam hal penanganan sampah melalui program 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*).

## **6. Kependudukan Dan Catatan Sipil**

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk yang masih rendah yaitu sebesar 0,85% dari total 203.352 penduduk usia >17 tahun atau telah menikah pada Tahun 2017. Rasio bayi berakte kelahiran masih cukup rendah yaitu sebesar 0,50 dari jumlah bayi yang lahir, sementara rasio pasangan berakte nikah sebesar 0,05% dari jumlah keseluruhan yang menikah. Untuk basis data kependudukan skala propinsi walaupun sudah ada tapi kadang masih bermasalah pada server. presentase KTP nasional berbasis NIK masih belum optimal yang juga dapat dilihat dari cakupan penerbitan KTP yang baru mencapai 85,07% dari total jumlah penduduk wajib KTP jika dibandingkan dengan target 100%. Cakupan akte kelahiran juga masih rendah. Ini mengindikasikan masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan dan belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan.

## **7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Desa yang baik pada Tahun 2017 sudah 100%. Sedangkan rata rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tahun 2013 s/d 2017 itu sama dengan jumlah LPM yang ada di desa. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Tahun 2013 s/d 2017 jumlah kelompok binaan sama dengan jumlah PKK. LPM berprestasi dari tahun ketahun mengalami peningkatan tahun 2015 s/d 2017 yaitu 9%, 12% dan 13%. Atau pada Tahun 2017 terdapat 13 LPM yang berprestasi dari 100 LPM yang ada. Persentase jumlah PKK dari Tahun 2013 s/d 2017 sebesar 100% aktif atau 100 orang PKK aktif semua. Presentase posyandu yang aktif 100% dari tahun 2013 s/d 2017 dengan jumlah posyandu sebanyak 442 unit.

Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan Tahun 2017 sebesar 37,50%. Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan sebesar 100% dari jumlah program sebanyak 10 dan total pasca pemberdayaan masyarakat sebanyak 10. Hal Ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan khususnya pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan masih kurang aktifnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa. Dari 100 LPM yang ada, hanya 13 LPM yang berprestasi pada Tahun 2017.

## **8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam kampung KB masih rendah, yakni hanya 2 dari total 38 SKPD yang ada dan hanya 1 perangkat daerah yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk. Sedangkan jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk sampai Tahun 2017 sebanyak 2 kebijakan. Jumlah sector yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan adalah 7 sektor, sedangkan jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan belum tersedia datnya.

Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah sampai Tahun 2017 adalah sebesar 68,12 atau sebesar 35.558 peserta KB aktif dari

52.196 pasangan usia subur yang ada. Angka kelahiran remaja masih cukup tinggi yakni sebesar 16,3 atau terdapat 217 jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun. Cakupan PUS dengan usia dibawah 20 tahun masih tinggi. Hal ini ditunjukkan bahwa cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun sebesar 2,1% pada Tahun 2017. Selain itu data tersebut dari tahun 2013-2017 cenderung meningkat. Ini mengindikasikan belum optimalnya pelaksanaan program KB. Angka cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmeet need*) pada Tahun 2017 hanya pada kisaran 16,76%.

Untuk Bina Keluarga Balita (BKB) juga masih perlu dioptimalkan dalam rangka pelaksanaan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak di Kabupaten Takalar.

## **9. Perhubungan**

Jumlah arus penumpang angkutan umum dari tahun ketahun mengalami penurunan yakni Tahun 2013 sebanyak 4.652 orang, Tahun 2014 sebanyak 4.160, Tahun 2015 sebanyak 3.465 orang, Tahun 2016 sebanyak 3.215 dan Tahun 2017 sebanyak 3.050 orang ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan pribadi masih mendominasi jumlah kendaraan di Kabupaten Takalar akibat kurangnya penggunaan fasilitas angkutan umum di daerah ini. Sementara rasio ijin trayek yang dikeluarkan di Kabupaten Takalar masih sangat kurang dibanding dengan jumlah penduduk 289.978 orang dengan ijin trayek yang diterbitkan sebanyak 314 lembar dengan persentase sebesar 0,00108 persen. Jumlah KIR angkutan umum yang merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan adalah sebanyak 2.920 buah di Tahun 2017. Sementara jumlah pelabuhan laut dari Tahun 2013 s/d 2017 tidak bertambah yakni sebanyak 1 pelabuhan. Untuk layanan penumpang angkutan darat dari jumlah angkutan darat Tahun 2017 sebanyak 447 buah dibandingkan dengan jumlah penumpang angkutan darat sebanyak 3.050 orang dengan presentase sebesar 14,65 persen, dengan demikian masih kurangnya penumpang angkutan darat yang belum terlayani karena keterbatasan armada angkutan, olehnya itu diharapkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan angkutan darat massal yang sarana dan prasarana tersebut telah disediakan oleh Pemerintah Propinsi.

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum masih rendah berdasarkan data yang ada yaitu pada Tahun 2017 angkutan umum sebanyak 447 buah dan Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun 2017 sebanyak 137 buah dengan presentase kepemilikan KIR angkutan umum 30,64 persen.

Untuk Pemasangan Rambu-rambu dari jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia pada Tahun 2017 sebanyak 350 buah sementara Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun 2017 sudah ada sebanyak 360 buah dengan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 2,24.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dengan jumlah kendaraan yang ada pada Tahun 2017 sebanyak 360 buah dengan panjang jalan 806 km, jadi rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 22.388,88. Untuk Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum pada terminal Type B tidak ada (0) yang terangkut, tetapi Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun adalah yakni pada tahun 2017 sebanyak 3.050 orang dan untuk barang terangkut sebesar 6.100 kg per tahun.

## **10. Kominfo**

Era keterbukaan informasi publik saat ini menuntut Pemerintah Kabupaten Takalar untuk dapat mengakselerasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu maka perlu adanya pengembangan sarana dan prasarana fasilitas public bidang telematika yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga percepatan budaya informasi dapat berjalan signifikan. Namun, masih terdapat beberapa isu yang menjadi tantangan dalam aspek informasi dan komunikasi.

Untuk Jaringan telekomunikasi yang ada di Kabupaten Takalar dilihat dari jumlah penduduk yang menggunakan telepon genggam pada Tahun 2017 sebanyak 188.485 atau sebesar 64,99%, sedangkan proporsi rumah tangga dengan akses internet pada Tahun 2017 adalah 0,0097 dari 67.001 jumlah rumah tangga yang ada. Untuk proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi sebesar 0,0016.

Kondisi alam (topografi dan demografis) menjadi kendala dalam coverage jaringan. Kondisi ini sulit dipasang perangkat peralatan transmisi data dan seluler. Dalam rangka percepatan penyebaran

informasi, telah dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat yang berbentuk Pusat Informasi Pedesaan (PIPedes) pada setiap Desa dan Kelurahan sebanyak 100 kelompok yang tersebar diseluruh kecamatan Kabupaten Takalar yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai wahana penggerak partisipasi masyarakat dalam hal penyampaian informasi dan penyaluran aspirasi masyarakat. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Selatan 2016, persentase penduduk Takalar yang memiliki alat komunikasi berupa telepon rumah dan telepon seluler hanya berkisar 50,59%, yang masih dibawah rata-rata propinsi Sulawesi Selatan sebesar 58,50%. Akses terhadap akses internet juga masih cukup rendah dengan proporsi yang mengakses internet sebesar 19,30% yang juga dibawah rata-rata propinsi Sulawesi Selatan sebesar 24,26. Sementara proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi berupa desktop, laptop maupun tablet hanya sebesar 14,63% yang juga masih dibawah rata-rata proporsi Sulawesi Selatan sebesar 19,10%.

Terkait pengembangan aplikasi *e-government*, masih kurangnya aplikasi yang dikembangkan serta belum optimalnya sinergi antar SKPD dalam mengembangkan sistem *e-government* yang terintegrasi. Hal tersebut terkait juga dengan minimnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknologi Informasi untuk pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang hanya sekitar 9%. Selain itu, website milik pemerintah Kabupaten Takalar yang telah dikembangkan sejak Tahun 2014 masih belum optimal untuk menyebarkan informasi publik ke masyarakat luas.

Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional yang terbit di Kabupaten Takalar pada Tahun 2016 sebanyak 2 terbitan sedangkan untuk jenis surat kabar lokal di Tahun 2016 sebanyak 10 terbitan. Penyiaran radio dan Televisi di Kabupaten Takalar adalah jumlah penyiaran radio lokal di Tahun 2016 sebanyak 2 siaran dan jumlah penyiaran radio nasional di Tahun 2016 sebanyak 5 siaran, sedangkan jumlah penyiaran TV lokal pada Tahun 2016 sebanyak 5 siaran dan untuk penyiaran TV Nasional pada Tahun 2016 sebanyak 10 siaran.

## **11. Koperasi dan UKM**

Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Takalar.

Pada Tahun 2017 sebesar 69,83% koperasi aktif dari total 358 koperasi. Hal ini disebabkan kurangnya kemampuan sumber daya manusia pengelola koperasi, kurangnya modal untuk pengembangan koperasi serta masih rendahnya peluang UMKM untuk meningkatkan skala usaha melalui peningkatan asset dan omset. Belum optimalnya pemberdayaan koperasi UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan disain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk masih rendah, Jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran masih terbatas, masih terbatasnya jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam pemasaran

## **12. Penanaman Modal**

Investasi merupakan salah satu variabel yang penting dalam sebuah perekonomian. Ada beberapa hal yang mempengaruhi investasi yaitu : suku bunga, PDRB, utilitas, birokrasi, kualitas SDM, regulasi, stabilitas politik dan keamanan serta faktor sosial budaya. Pada Tahun 2014 jumlah investor sebanyak 27 kemudian mengalami penurunan di Tahun 2015 menjadi 9 investor dan Tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 28 investor. Penurunan jumlah investor pada Tahun 2015 disebabkan kondisi sarana dan prasarana meliputi sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, utilitas, pembuangan limbah dan lain lain. Tahun 2017 jumlah nilai investasi di Kabupaten Takalar sebesar Rp.39.265.000.000,- mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sebesar Rp.12.620.000.000.

## **13. Kepemudaan Dan Olahraga**

Persentase organisasi kepemudaan yang aktif sudah 100 persen, ini ditandai dengan adanya 8 organisasi kepemudaan yang masih aktif dari Tahun 2015 s/d 2017. Sedangkan Persentase jumlah wirausaha masih kecil yakni jumlahnya masih 6 orang wirausaha muda yang terjun dalam dunia usaha dari Tahun 2015 s/d 2017. Berdasarkan data yang ada masih kurangnya wirausaha muda yang ada di Kabupaten Takalar.

Cakupan pembinaan olahraga sampai Tahun 2017 mencapai 61,53 dari 13 cabang olahraga yang ada/terdaftar, mengalami penurunan 11,8 dari Tahun 2016 yang mencapai 73,33 dari 15 cabang olah raga. Tingkat

pembinaan masih rendah, olehnya itu perlu pembinaan yang baik untuk menelurkan atlet yang berprestasi.

Dari seluruh jumlah pelatih yang ada sampai dengan Tahun 2017, ada 30 orang pelatih telah bersertifikat, atau cakupannya berada pada kisaran 60% dari 50 orang pelatih yang ada. Dari keseluruhan atlet pelajar yang ada yaitu sebesar 220 orang pada Tahun 2017 tetapi yang dibina hanya 8 orang yaitu baru 3,37 persen cakupan atlet pelajar yang telah dibina. Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa pembinaan atlet pelajar masih kurang dibina atau di tangani oleh pemerintah.

Prestasi olahraga yang telah dicapai dari atlet Kabupaten Takalar adalah telah mengukir prestasi yang membanggakan baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan data menunjukkan dari jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional yaitu sekitar 11 orang pada Tahun 2016 dan pada Tahun 2017 kembali terjadi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun mencapai 11 orang atlet. Prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dari keseluruhan dalam satu tahun yakni mencapai 6 cabang olahraga pada Tahun 2016 dan kembali lagi mencapai 6 cabang olahraga dari jumlah prestasi pada Tahun 2017.

#### **14. Statistik**

Sistem data dan Statistik yang terintegrasi belum diterapkan. Telah tersedia dokumen statistik, namun dalam penyajiannya masih ada jenis data terkait informasi pembangunan daerah yang perlu ditambahkan.

#### **15. Persandian**

Belum adanya OPD (organisasi perangkat daerah) di Kabupaten Takalar yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah, dengan demikian maka masalah yang muncul di aspek persandian adalah tidak optimalnya pemerintah daerah dalam menangani persandian untuk komunikasi perangkat daerah.

#### **16. Kebudayaan**

Dari keseragaman budaya di Kabupaten Takalar penyelenggaraan festival seni dan budaya berdasarkan data yang ada

menunjukkan bahwa dari Tahun 2013 s/d 2015 sebanyak 16 kali dan Tahun 2016 sebanyak 21 kali sedangkan Tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 27 kali pelaksanaan, dibandingkan dengan keanekaragaman kebudayaan yang banyak di Indonesia maka penyelenggaraan festival seni dan budaya di daerah kita sangatlah sedikit, ini bisa diakibatkan oleh kurangnya kepedulian pemerintah dalam mengangkat dan membenahi kebudayaan kita untuk dipromosikan ke masyarakat yang bisa berimbas pada kurangnya kunjungan wisata di daerah ini. Ini dibuktikan juga bahwa persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan masih rendah yakni baru 30 persen dari total jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya dari Tahun 2013 s/d 2017 sebanyak 40 jenis dan yang dilestarikan baru 12 jenis dari benda, situs dan kawasan cagar budaya ini berarti bahwa kurangnya kepedulian pemerintah dalam menangani pelestarian budaya yang ada di Kabupaten Takalar.

#### **17. Perpustakaan**

Jumlah pengunjung perpustakaan Tahun 2017 sebesar 20.865 orang atau rata-rata 0.08% pengunjung pertahunnya mengalami kenaikan 100% dari Tahun 2016 yang hanya mencapai 10.423 atau rata-rata 0,04%. Ini disebabkan karena masih rendahnya rasio perpustakaan persatuan penduduk sebesar 1.64% : 10.000 penduduk. Jumlah koleksi buku yang tersedia juga masih kurang yakni sebesar 0,40 dan jumlah koleksi judul yang tersedia di perpustakaan daerah sebesar 8.641 judul buku. Perpustakaan Kabupaten Takalar tidak memiliki pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat. Ini semua disebabkan karena kurangnya minat baca yang ada dimasyarakat dan kualitas dan kuantitas buku masih kurang.

#### **18. Kearsipan**

Kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pengelola Kearsipan pada Tahun 2016 sebanyak 1 kegiatan dan pada Tahun 2017 tidak ada kegiatan untuk peningkatan SDM pengelola kerarsipan.

Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang telah mengelola arsip secara baku Tahun 2016 sebanyak 10 OPD, sedangkan Tahun 2017 bertambah menjadi 15 OPD atau 39.47% OPD mengelola arsip secara



baku dari 38 OPD yang ada di Kabupaten Takalar. Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman sistem kearsipan yang baku disetiap OPD.

## C. URUSAN PILIHAN

### 1. Pariwisata

*Kunjungan Wisata* ; Pada Tahun 2016 kunjungan wisata di Kabupaten Takalar mencapai angka 21.050 kunjungan (35,08%) dari total target 60.000 kunjungan, sedangkan kunjungan wisata di Provinsi mencapai angka 7 juta kunjungan. Jika dibandingkan dengan Provinsi nilai kunjungan wisata di Kabupaten Takalar masih rendah, hal ini dikarenakan objek wisata umumnya masih dalam tahap pembangunan. Selain itu fasilitas/infrastuktur menuju objek wisata masih belum maksimal, ditambah lagi dengan promosi wisata yang masih rendah.

*Lama Kunjungan Wisata* ; Lama Kunjungan wisata di kabupaten Takalar jika dilihat dari rata-rata kunjungan wisata dalam 1 tahun adalah 2.473 Orang. Jika dibandingkan dengan jumlah provinsi yang mencapai 6 juta - 7 juta orang masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata di Kabupaten Takalar masih dalam tahap pengembangan. Garis pantai yang terbentang di bagian barat Kabupaten Takalar merupakan potensi kabupaten yang patut mendapat perhatian baik untuk sektor jasa ataupun sektor produksi perikanan.

*PAD Sektor Pariwisata* ; Nilai PAD yang disumbangkan sektor pariwisata yaitu sebesar 42.100.000 (35,08 %) dari total PAD. Dengan nilai tersebut dapat dipastikan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD cukup besar. Meskipun demikian masih diperlukan promosi yang lebih gencar untuk dapat meningkatkan PAD dari sektor ini. Saat ini terdapat beberapa objek wisata yang dibawah pengelolaan PEMDA. Keberadaan objek tersebut memerlukan perhatian khusus agar kedepannya dapat meningkatkan PAD.

### 2. Pertanian

#### a. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Tingkat kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB pada Tahun 2017 sebesar 649.191,11 atau 12,01% dari total PDRB. Jika dibandingkan dengan kontribusi sektor

pertanian/perkebunan pada Tahun 2016 sebesar 12,32% atau mengalami Penurunan sebesar 0,21 %.

Turunnya nilai kontribusi sektor pertanian/perkebunan disebabkan karena adanya peningkatan beberapa sektor lain seperti pariwisata. Selain itu, penurunan ini dikarenakan kurang maksimalnya penerapan teknologi pertanian ditingkat petani.

*b. Kontribusi sektor pertanian (Palawija) terhadap PDRB*

Kontribusi sektor pertanian (Palawija) terhadap PDRB sebesar 0,32 % pada Tahun 2016, mengalami penurunan dari Tahun 2015 sebesar 0,58% menjadi 0,90%. Rendahnya kontribusi palawija terhadap PDRB dikarenakan sebagian besar produksi pertanian terfokus pada produksi tanaman pangan utama. Selain itu, masih kurangnya tingkat penganekaragaman pangan di tingkat rumah tangga berdampak bagi kurangnya minat petani menanam palawija.

*c. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB*

Kontribusi sektor Perkebunan (Tanaman keras) terhadap PDRB Tahun 2016 sebesar 75.347,68 atau sebesar 1,39% dari total PDRB Kabupaten Takalar. Meskipun demikian kontribusi tersebut mengalami penurunan dari Tahun 2015 sebesar 0,7% dari total kontribusi sebesar 1,46 %. Turunnya kontribusi ini dikarenakan umur tanaman yang telah melewati batas maksimal produksi. Selain itu, kualitas produksi yang kurang layak.

### **3. Perdagangan**

Ekspor bersih perdagangan Kabupaten Takalar dapat dilihat dari indikator rata-rata nilai ekspor yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2013 Rp.1.576.602.02 dan Tahun 2014 Rp.2.032.191.02, Tahun 2015 Rp.2.394.471.74 serta Tahun 2016 sebesar Rp.2.806.130.25. Sedangkan nilai impor sangat kurang atau bisa di katakan tidak memiliki nilai dari Tahun 2013 s/d 2016 hanya memiliki nilai 0 (nol) atau tidak dilakukan impor ke daerah ini dari tahun ke tahun. Berarti nilai ekspor bersih dari daerah ini memiliki nilai yang sama dengan nilai ekspor.

Cakupan binaan kelompok pedagang/ usaha informal dari Tahun 2013 s/d 2017 mengalami penurunan, berdasarkan data yang ada untuk Tahun 2013 sebesar jumlah kelompok pedagang/ usaha sebanyak 541 kelompok dan yang telah dilakukan pembinaan oleh pemerintah

sebanyak 382 kelompok atau 70,60 persen, Tahun 2014 sebesar jumlah kelompok pedagang/ usaha sebanyak 556 kelompok dan yang telah dilakukan pembinaan oleh pemerintah sebanyak 384 kelompok atau 69,06 persen, Tahun 2015 sebesar jumlah kelompok pedagang/ usaha sebanyak 687 kelompok dan yang telah dilakukan pembinaan oleh pemerintah sebanyak 434 kelompok atau 63,17 persen, 2016 sebesar jumlah kelompok pedagang/ usaha sebanyak 756 kelompok dan yang telah dilakukan pembinaan oleh pemerintah sebanyak 387 kelompok atau 51,19 persen, 2017 sebesar jumlah kelompok pedagang/ usaha sebanyak 644 kelompok dan yang telah dilakukan pembinaan oleh pemerintah sebanyak 375 kelompok atau 58,22 persen.

Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa pembinaan kelompok pedagang/usaha belum optimal disebabkan karena kurangnya anggaran dan sarana pendukung sehingga perlu diperhatikan dan dibina dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha perdagangannya.

#### **4. Perindustrian**

Cakupan bina kelompok pengrajin dapat dilihat dari data yang ada yakni untuk Tahun 2013 jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan dari Pemda sebanyak 26 kelompok dari jumlah kelompok pengrajin sebanyak 610 kelompok berarti baru 4,26 persen yang mendapatkan bantuan dari Pemda, Tahun 2014 jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan dari Pemda sebanyak 33 kelompok dari jumlah kelompok pengrajin sebanyak 625 kelompok berarti baru 5,28 persen yang bisa di bantu oleh Pemerintah, tahun 2015 jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan dari Pemda sebanyak 38 kelompok dari jumlah kelompok pengrajin sebanyak 653 kelompok berarti baru 5,81 persen yang bisa di bantu oleh Pemerintah, Tahun 2015 jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan dari Pemda sebanyak 44 kelompok dari jumlah kelompok pengrajin sebanyak 1.224 kelompok berarti baru 3,59 persen yang bisa di bantu oleh Pemerintah, sementara Tahun 2017 jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan dari Pemda sebanyak 66 kelompok dari jumlah kelompok pengrajin sebanyak 1.960 kelompok berarti baru 3,37 persen yang bisa di bantu oleh Pemerintah.

Berdasarkan data tersebut persentase jumlah kelompok pengrajin dengan jumlah kelompok pengrajin masyarakat sangat kecil, karena itu masyarakat sangat mengharapkan bimbingan dan bantuan dari pemerintah untuk dapat meningkatkan keterampilan kerajinan dan kesejahteraan mereka .

## **5. Transmigrasi**

Presentase transmigrasi swakarsa di Kabupaten Takalar dengan total jumlah transmigrasi pada Tahun 2013 s/d 2016 sebanyak 1.259 orang sementara Tahun 2017 meningkat menjadi 1.437 orang. Tetapi untuk transmigrasi swasakarsa tidak dilaksanakan oleh pemerintah masyarakat karena masyarakat tidak berminat mengikuti program ini, oleh karena pihak Pemda belum optimal dalam mensosialisasikan/ menginformasikan tentang program transmigrasi swakarsa.

## **6. Perikanan**

*Produksi Ikan;* Jumlah produksi ikan Tahun 2017 sebesar 9.505 ton meningkat dibandingkan Tahun 2016 sebesar 9.372 ton. Peningkatan ini didukung oleh potensi perikanan darat dan laut dengan sarana produksi yang baik. Selain itu, penerapan teknologi budidaya perikanan dan perikanan tangkap yang cukup baik serta pengelolaan Sumber daya yang baik pula.

*Konsumsi Ikan ;* Jumlah konsumsi ikan pada Tahun 2017 sebanyak 54,25 ton, turun dari Tahun 2016 sebesar 54,69 ton, tingkat penurunan konsumsi ikan hanya 0,8 %. Penurunan konsumsi ikan ini dikarenakan adanya upaya penganeekaragaman pola makan, sehingga kebutuhan protein disuplai dari protein hewani lainnya.

*Cakupan Binaan Kelompok Nelayan ;*Cakupan Binaan Kelompok nelayan pada Tahun 2017 sebanyak 330 kelompok meningkat dari Tahun 2016 sebesar 300 Kelompok. Peningkatan cakupan binaan kelompok Nelayan disebabkan karena adanya rekstrukturisasi penyuluh perikanan secara kelembagaan.

## **D. URUSAN PENUNJANG**

### **1. Perencanaan Pembangunan**

Dokumen perencanaan RPJPD telah ada dan sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ( PERDA ), dan dokumen perencanaan

Pembangunan Daerah yakni RPJMD juga telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar dengan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2013 - 2018. Untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) telah ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Daerah yang ditetapkan sebagai PERKADA.

Dokumen Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) Kabupaten Takalar sudah ada dan telah di PERDA kan. Berdasarkan data dokumen perencanaan pembangunan yang ada di BAPPEDA maka terjadi masalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya ketersediaan perencanaan pembangunan sektoral yang memadai.
- Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan sektoral.
- Belum optimalnya dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Masih rendahnya kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran.
- Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan RTRW.

## **2. Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Laporan Pelaksanaan APBD Kabupaten Takalar Tahun 2012 sampai Tahun 2014 adalah Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer*) sedangkan dalam dua tahun terakhir yaitu Tahun 2015 dan Tahun 2016 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil opini BPK pada tiga tahun pertama disebabkan oleh pengelolaan aset lainnya yang kurang tertib dan pengelolaan kas tidak diakui kewajarannya, pengelolaan dana BOS, dan utang pihak ketigasedang dua tahun terakhir disebabkan oleh kurang tertibnya pengelolaan aset lainnya.

*Persentase SILPA terhadap Total APBD* Persentase SiLPA terhadap total APBD Tahun 2012 adalah 13,57 persen, Tahun 2013 adalah 4,97 persen, Tahun 2014 adalah 7,82 persen, Tahun 2015 adalah 10,35 persen dan Tahun 2016 adalah 12,31 dan jika dirata-ratakan

selama periode lalu adalah 9,80 pertahun. Dengan memperhatikan data tersebut mencerminkan bahwa pertumbuhan SiLPA fluktuatif yaitu turun pada Tahun 2013 dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

*Persentase SILPA terhadap Total APBD* Persentase SILPA terhadap total APBD Tahun 2012 adalah 0,50 persen, Tahun 2013 adalah 1,10 persen, Tahun 2014 adalah 0,15 persen, Tahun 2015 adalah 0,04 persen dan Tahun 2016 adalah 0,46 dan jika dirata-ratakan selama periode lalu adalah 0,09 per tahun. Dengan memperhatikan data tersebut mencerminkan bahwa pertumbuhan SiLPA fluktuatif yaitu sempat naik dalam tiga tahun pertama dan turun pada tahun keempat dan kelima.

*Persentase Program/Kegiatan yang tidak Terlaksana* Persentase program yang tidak terlaksana dalam Tahun 2012 adalah 0,34 persen, Tahun 2013 sebesar 0,17 persen, Tahun 2014 adalah 0,17 persen, Tahun 2015 adalah 0,17 persen dan Tahun 2016 adalah 0,25 dan jika dirata-ratakan selama periode lalu adalah 0,21 persen per tahun. Sementara Persentase kegiatan yang tidak terlaksana dalam Tahun 2012 adalah 1,29 persen, Tahun 2013 sebesar 1,01 persen, Tahun 2014 adalah 0,97 persen, Tahun 2015 adalah 0,92 persen dan Tahun 2016 adalah 0,91 dan jika dirata-ratakan selama periode lalu adalah 1,02 persen per tahun. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa hamper semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Hal ini juga tercermin dari realisasi belanja langsung pada OPD yang realisasinya di atas 90 persen.

*Persentase Belanja Bidang Urusan Pendidikan terhadap total belanja APBD* Realisasi belanja bidang urusan pendidikan pada Tahun 2013 sebesar Rp 301.489.303.271,00 atau sekitar 45 persen dari total realisasi belanja APBD yaitu sebesar Rp 669.958.598461,00 Tahun 2014 sebesar Rp 334.026.575.727,00 atau sekitar 40,86 persen dari total realisasi belanja APBD yaitu sebesar Rp 817.584.343.523,00 Tahun 2015 sebesar Rp 361.531.390.009,50 atau sekitar 37,49 persen dari total realisasi belanja APBD yaitu sebesar Rp 964.299.330.813,50 dan Tahun 2016 sebesar Rp 368.114.113.582,00 atau sekitar 28,46 persen dari total realisasi belanja APBD, pada Tahun 2016 sebesar Rp1.293.441.312.395,00.

Dari data di atas menggambarkan bahwa realisasi belanja bidang urusan pendidikan rata-rata mencapai 37,95 persen atau jauh di atas amanat undang-undang yaitu minimal 20 persen.

*Persentase Belanja Bidang Urusan Kesehatan terhadap total belanja APBD* Realisasi belanja bidang urusan kesehatan pada Tahun 2013 sebesar Rp 89.077.887.486,00 atau sekitar 13,30 persen dari total realisasi belanja APBD yaitu sebesar Rp 669.958.598461,00 tahun 2014 sebesar Rp 124.448.991.974,00 atau sekitar 15,22 persen dari total realisasi belanja APBD yaitu sebesar Rp 817.584.343.523,00 tahun 2015 sebesar Rp 158.375.540.439,00 atau sekitar 16,42 persen dari total realisasi belanja APBD yaitu sebesar Rp 964.299.330.813,50 dan Tahun 2016 sebesar Rp 227.400.024.491,00 atau sekitar 17,58 persen dari total realisasi belanja APBD, pada Tahun 2016 sebesar Rp 1.293.441.312.395,00.

Dari data di atas menggambarkan bahwa realisasi belanja bidang kesehatan mencapai 15,63 persen yang berarti telah sesuai dengan harapan pemerintah yaitu minimal 10 persen dari total belanja APBD.

*Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung* Realisasi belanja tidak langsung terhadap total belanja APBD Tahun 2012 sebesar Rp 378,71 milyar lebih atau sekitar 59,78 persen dari total realisasi belanja APBD yaitu Rp 633,51 milyar lebih, Tahun 2013 sebesar Rp 363,73 milyar lebih atau sekitar 54,29 persen dari total realisasi belanja APBD yaitu Rp 669,96 milyar lebih, Tahun 2014 sebesar Rp 439,99 milyar lebih atau sekitar 53,82 persen dari total realisasi belanja APBD yaitu Rp 817,58 milyar lebih, Tahun 2015 sebesar Rp 503,47 milyar lebih atau sekitar 52,21 persen dari total realisasi belanja APBD yaitu Rp 964,29 milyar, dan Tahun 2016 sebesar Rp 608,29 milyar lebih atau sekitar 47,03 persen dari total realisasi belanja APBD yaitu Rp 1.293,41 milyar lebih, atau rata-rata persentasenya sekitar 53,43 persen.

Realisasi belanja langsung terhadap total belanja APBD Tahun 2012 sebesar Rp 254,79 milyar lebih atau sekitar 40,22 persen dari total realisasi belanja APBD yaitu Rp 633,51 milyar lebih, Tahun 2013 sebesar Rp 306,23 milyar lebih atau sekitar 45,71 persen dari total realisasi belanja APBD yaitu Rp 669,96 milyar lebih, Tahun 2014

sebesar Rp 377,59 milyar lebih atau sekitar 46,18 persen dari total realisasi belanja APBD yaitu Rp 817,58 milyar lebih, Tahun 2015 sebesar Rp 460,83 milyar lebih atau sekitar 47,79 persen dari total realisasi belanja APBD yaitu Rp 964,29 milyar, dan Tahun 2016 sebesar Rp 685,12 milyar lebih atau sekitar 52,97 persen dari total realisasi belanja APBD yaitu Rp 1.293,41 milyar lebih, atau rata-rata persentasenya sekitar 46,57 persen.

*Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa* Realisasi belanja bagi hasil kepada pemerintah desa terhadap total belanja APBD Tahun 2012 sebesar Rp 6,65 milyar lebih atau sekitar 1,05 persen dari total realisasi belanja APBD yaitu Rp 633,51 milyar lebih, Tahun 2013 sebesar Rp 377,18 juta lebih atau persentasenya di bawah 0,01 persen dari total realisasi belanja APBD yaitu Rp 669,96 milyar lebih, Tahun 2014 sebesar Rp 385 juta lebih atau persentasenya di bawah 0,01 persen dari total Tahun 2014 sebesar Rp 817,58 milyar lebih, Tahun 2015 sebesar Rp 31,63 milyar lebih atau persentasenya 3,28 persen dari total Tahun 2015 sebesar Rp 964,29 milyar lebih dan Tahun 2016 sebesar Rp 66,95 milyar lebih atau sekitar 5,18 persen dari total Tahun 2016 sebesar Rp 1.293,41 milyar lebih dan jika dirata-ratakan selama periode lalu adalah 1,90 persen per tahun.

*Penetapan APBD;* Penetapan APBD Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012, APBD Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013, APBD Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2013, APBD Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2014 dan APBD Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2015. Selama periode lalu penetapan APBD dua tahun pertama yaitu 2012 dan 2013 tidak tepat waktu, yaitu disebabkan oleh adanya peralihan kepemimpinan atau masa transisi, namun dalam tiga tahun terakhir periode lalu selalu ditetapkan tepat waktu yaitu pada Bulan Desember tahun berkenaan.

### **3. Kepegawaian serta Pendidikan & Pelatihan**

Salah satu sumber daya aparatur yang mempunyai peranan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan adalah Aparatur Sipil Negara. Pemerintah akan berjalan dengan baik dan tertib apabila didukung dengan sumber daya aparatur yang mampu, terampil dan penuh disiplin. Salah satu



unsur penyelenggaraan pemerintahan yang perlu memperoleh perhatian ialah penataan aparatur pemerintah yang meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem dan manajemen sumber daya pegawai. Oleh karena itu masalah peningkatan dan pengembangan pegawai selalu menjadi perhatian dari instansi pemerintah.

Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun 2017 berjumlah 5.504 orang. Jumlah ini terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi sebanyak 32 orang, Jabatan Administrator sebanyak 144 orang, Jabatan Pengawas sebanyak 513 orang, Jabatan Administrasi sebanyak 1.785 orang dan Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 3.030 orang.

Dari 5.504 orang ASN tersebut rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik formal maupun struktural dan teknis masih cukup rendah. Artinya setiap pegawai harus menunggu beberapa tahun untuk bisa mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dari jumlah total Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 5.486 orang dibandingkan dengan jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal sebanyak 340 orang adalah sebesar 0,06 %. Ini berarti bahwa prosentase ASN yang mengikuti pelatihan dan pendidikan masih rendah, karena rendahnya prosentase ASN yang mengikuti Diklat dapat menyebabkan kemampuan aparatur dan kualitas Sumber Daya Manusia kurang. Rasio persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural dari total jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat structural sebanyak 397 orang dibandingkan dengan jumlah total jabatan sebanyak 690 orang adalah sebesar 57,54 % ASN yang mengikuti Diklat Struktural.

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah sebanyak 32 orang, ini berarti jabatan pimpinan tinggi sudah terisi oleh ASN. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah sebanyak 176 orang. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah sebanyak 3.030 orang. Masalahnya belum maksimalnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk ASN di Kabupaten Takalar sehingga banyak ASN yang belum dapat

mengikuti Dilat structural ini disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk pengembangan aparatur dalam peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara. Salah satu akar masalah dari belum optimalnya kinerja tersebut diatas adalah belum adanya Analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan, serta standar kompetensi jabatan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

#### **4. Penelitian & Pengembangan**

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah belum berjalan dengan optimal. Persentase rencana penelitian dan pengembangan daerah yang terimplementasikan masih rendah, sementara hasil litbang yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan juga masih terbatas, baik dalam bentuk naskah akademik kebijakan ataupun paket aplikasi teknologi. Dalam hal inovasi, penerapan SIDA di Kabupaten Takalar sudah dibuat, yakni sudah dalam bentuk Roadmap SIDA, sekarang sudah dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup/Perkada) tetapi sampai sekarang belum di Perda-kan.

#### **5. Pengawasan**

Rasio persentase tindak lanjut temuan sebesar 100 % sudah ditangani oleh Inspektorat daerah ini menandakan bahwa kesungguhan pengawasan dilingkup Kabupaten Takalar sudah berjalan dengan baik, sementara persentase pelanggaran pegawai di Pemerintah Daerah Takalar di Tahun 2016 sebanyak 4 pelanggaran dan telah direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian dan SDM Kabupaten Takalar untuk ditindak lanjuti (pemberian sanksi). Permasalahan yang biasa terjadi adalah kurang maksimalnya koordinasi antara Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian dan SDM dalam pemberian sanksi kepada Pegawai yang telah melakukan pelanggaran untuk dilaporkan kembali ke Inspektorat sebagai hasil tindak lanjut.

Untuk jumlah temuan dari pemeriksaan BPK menurun dari Tahun 2013 sebanyak 23 temuan turun menjadi 18 temuan. Hasil Pemeriksaan dari BPK yakni Kabupaten Takalar, Tahun 2013 Opini TMP ( Disclaimer) menjadi Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Tahun 2014 sampai 2017. Ini mengartikan bahwa pengawasan

pada Inspektorat Kabupaten belum dilaksanakan secara optimal karena masih terdapatnya temuan dari pemeriksaan dan juga belum menggapai predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang sudah berjalan dengan baik dan benar.

## **6. Sekretariat Dewan**

Produktivitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar dalam memfasilitasi kelancaran tugas-tugas DPRD pada Tahun 2016 dapat terlihat dari pencapaian indikator kinerja Ranperda yang disetujui sebesar 100 persen atau terdapat 8 Ranperda yang disetujui dari 8 dan terdapat 9 (sembilan) Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam Tahun 2016. Selanjutnya Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Takalar masih belum maksimal, Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) belum tersusun dan terintegrasi, dan program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD juga belum terintegrasi. Salah satu akar masalah dari belum optimalnya kinerja tersebut di atas adalah masih lemahnya sumber daya aparatur sekretariat DPRD dan Alat Alat Kelengkapan Dewan.

## **7. Kecamatan**

Kabupaten Takalar mempunyai 9 Kecamatan yang terdiri dari 100 desa dan kelurahan. Dimana Kec. Pattalassang sebagai ibukota Kabupaten, 8 kecamatan yang lainnya adalah Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sanrobone, Kecamatan Galesong Selatan, Galesong dan Kecamatan Galesong Utara.

### **4.3 Analisis Isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

#### **Penentuan Isu Strategis**

Salah satu isu internasional yang mempengaruhi pembangunan daerah adalah isu-isu yang tercakup dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*). Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan sebagai isu pembangunan daerah Sulawesi Selatan adalah: (1) tanpa kemiskinan, isunya adalah kemiskinan diperdesaan dan perkotaan; (2) tanpa kelaparan, isunya adalah kekurangan gizi; (3) kehidupan sehat dan sejahtera, isunya adalah kematian ibu dan bayi; (4) pendidikan berkualitas isunya adalah akses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi; (5) kesetaraan gender, isunya adalah ketidaksetaraan gender lembaga pemerintah maupun swasta; (6) air bersih dan sanitasi layak, isunya adalah rumah tidak bersanitasi layak dan rumah tidak layak huni; (7) energy bersih dan terjangkau, isunya adalah penggunaan gas oleh rumah tangga dan tingkat elektrifikasi; (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, isunya adalah tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan perkapita; (9) industri, inovasi dan infrastruktur, isunya adalah akses jalan layak bagi penduduk desa, kualitas jalan, ketersediaan pelabuhan dan dermaga; (10) berkurangnya kesenjangan, isunya adalah ketimpangan pendapatan dan desa tertinggal; (11) kota dan permukiman berkelanjutan, isunya adalah pemukiman kumuh, penggunaan angkutan umum perkotaan; (12) konsumsi dan produksi berkelanjutan, isunya adalah daur ulang sampah dan limbah B3; (13) penanganan perubahan iklim, isunya adalah kejadian dan dampak bencana serta emisi gas rumah kaca; (14) ekosistem lautan, isunya adalah perlindungan nelayan dan konservasi perairan; (15) ekosistem daratan, isunya adalah kawasan hutan, lahan kritis dan terdegradasi serta

kesatuan pengelolaan hutan (KPH); (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, isunya adalah kejahatan pembunuhan, kejahatan kekerasan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, reformasi birokrasi, SAKIP, opini laporan keuangan, *e-procurement*; (17) kemitraan untuk mencapai tujuan, isunya adalah kerjasama pemerintahan.

Isu internasional lainnya adalah berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN. Pada aspek integrasi pasar, isunya adalah daya saing produk dalam menghadapi ancaman penetrasi produk negara Asean kedalam pasar Sulawesi Selatan dan adanya tantangan untuk meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing memasuki pasar negara Asean. Pada aspek integrasi tenaga kerja, isunya adalah daya saing tenaga kerja dalam menghadapi ancaman penetrasi tenaga kerja asing ke Sulawesi Selatan dan adanya tantangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Sulawesi Selatan untuk bisa bersaing dalam bursa tenaga kerja Asean.

Pada level nasional, terdapat beberapa prioritas nasional yang menjadi mandat bagi daerah yang tertuang dalam Nawa Cita RPJMN 2015-2019. Prioritas nasional tersebut mencakup: (1) dimensi pembangunan manusia yakni revolusi mental, pendidikan, kesehatan dan perumahan; (2) dimensi pembangunan sektor unggulan yakni kedaulatan pangan, kedaulatan energy dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri; (3) dimensi pemerataan dan keiwilayahan yakni pemerataan antar kelompok pendapatan dan pemerataan antar wilayah mencakup pembangunan desa, pembangunan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal dan pembangunan perkotaan. Selain itu terdapat sejumlah prioritas yang merupakan prakondisi bagi berjalannya pembangunan yakni kepatuhan dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Pada level daerah Sulawesi Selatan, berdasarkan permasalahan pembangunan yang telah diidentifikasi, terdapat beberapa isu strategis. Isu kualitas manusia masih merupakan prioritas karena meskipun IPM Sulawesi Selatan sudah cukup terakselerasi dalam lima tahun terakhir sehingga menempati ranking 14 nasional, namun nilainya masih di bawah rata-rata nasional. Dalam hal kesejahteraan masyarakat, salah satu isu yang perlu menjadi perhatian adalah ketimpangan pendapatan, berhubung rasio gini Sulawesi Selatan cukup tinggi. Terkait dengan poin ini adalah isu kemiskinan dan pengangguran serta pendapatan masyarakat. Selain itu, isu infrastruktur

wilayah juga memiliki relevansi tinggi mengingat perkembangan ekonomi dan berbagai aspek kehidupan lainnya memerlukan konektivitas wilayah yang baik. Pada isu infrastruktur ini juga terkait isu kondisi perumahan dan permukiman serta infrastruktur irigasi dan energi. Dalam mendukung keberlanjutan, lima tahun kedepan pembangunan Sulawesi Selatan juga menghadapi masalah lingkungan hidup terkait kualitas tutupan lahan serta kualitas air dan udara serta daya dukung sumberdaya alam terhadap pertanian secara umum. Isu daerah yang tidak kalah pentingnya adalah tata kelola pemerintahan. Meskipun berbagai penghargaan telah diperoleh karena keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk opini WTP terhadap laporan keuangan, namun pada aspek lainnya seperti akuntabilitas kinerja dan keterbukaan informasi publik masih terdapat sejumlah tantangan. Terkait pula didalamnya adalah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik